

adalah Cirebon, Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Kedu, dan Jepara.¹⁸

Perlu di catat bahwa NU sebagai sebagai wadah organisasi keagamaan Islam tradisional terbesar di Inonesia telah menancapkan kakinya di Pekalongan sejak masa-masa awal kelahiran organisasi tsb. Bahkan menurut cerita lokal yang berkembang dikalangan para warga NU di Pekalongan bahwa terdapat keterlibatan tokoh-tokoh lokal Pekalongan didalam proses kelahiran NU. Menurut ceritanya¹⁹ KH Hasyim Al Asy'ari, tokoh pendiri NU, sebelum pembentukan NU Kyai Hasyim mendapat petunjuk untuk melakukan silaturahmi pada Habib Hasyim²⁰ yang tinggal di Pekalongan dan meminta masukan untuk pembentukan NU ini. Oleh karena itu lah dalam cerita lokal selanjutnya ada cerita bahwa konon paska silaturahmi tersebut, Mukhtar NU pertama dilakukan di Pekalongan.²¹ Namun menurut jurnal Risalah Edisi 55/ Tahun 2015 yang di terbitkan oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Mukhtar NU pertama pada tanggal 21 Oktober 1926 diselenggarakan di Kota Surabaya. Mukhtar NU di Pekalongan terjadi pada tahun 1930 atau pada Mukhtar NU ke V.

Di Pekalongan kelompok Aliran Rifa'iyah merupakan kelompok yang cukup besar dan merupakan pusat dari penyebaran ajaran keberbagai daerah lainnya. Rifa'iyah merupakan kelompok Islam yang mengikuti ajaran dari Kyai Ahmad Rifa'i²². Aliran Rifa'iyah ini

¹⁸ Lihat Dhofier, 1982, hal 35.

¹⁹ Wawancara dengan Mas Fauzin, Kyai Zakaria dan Kyai Marzuqi, di bulan November 2015.

²⁰ Habib Hasyim adalah kakek dari Habib Luthfi bin Yahya salah seorang tokoh NU Jawa Tengah yang tinggal dan berasal dari Pekalongan.

²¹ Dalam versi yang lain Mukhtar NU pertama berlangsung di Surabaya.

²² Dalam wawancara dengan Agus Syaefudin, Ketua Harian DPD (Dewan Pengurus Daerah) Kota Pekalongan didapat informasi tentang Kyai Ahmad Rifa'i. Kyai Ahmad Rifa'i merupakan seorang ulama di abad ke 19. Beliau berasal dari Kaliwungu Kabupaten Kendal. Setelah pulang dari menimba ilmu agama Islam di Mekah bersama Kyai Kholil Bangkalan (guru dari KH. Hasyim Asy'ari pendiri NU dan Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah) dan Kyai Nawawi dari Batang, Kyai Ahmad Rifa'i mengajarkan kepada umatnya dengan cara yang berbeda untuk memudahkan pemahaman orang

mengacu pada kitab Tarojumah²³ yang ditulis oleh Kyai Rifa'i dalam bahasa Jawa. Saat ini Aliran Rifa'iyah memiliki tempat pendidikan tradisional yang berupa pesantren maupun moderen seperti Paud, TK Rifa'iyah, MI Rifa'iyah, Mts Rifa'iyah, Aliyah Rifa'iyah, dan SMA Rifa'iyah. Pesantren Rifa'iyah sebagian besar ada di Kabupaten Pekalongan, khususnya di daerah Kedungwuni, Paesan dan Kesesi. Khusus di daerah Kedungwuni, terdapat Pesantren Anirsad yang menjadi pusat awal penyebaran Rifa'iyah di Pekalongan. Sedangkan kantong terbesar kelompok ini ada di Paesan²⁴.

Dalam perjalanan waktu berbagai aliran dan organisasi keagamaan Islam modern juga berkembang di Pekalongan. Organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi SI sudah ada di Pekalongan yaitu sejak tahun 1913 atau satu tahun setelah SDI berdiri di Solo oleh Haji Samanhudi. Di bawah kepemimpinan HOS

Jawa. Cara yang digunakan adalah dengan penyampaian dengan bahasa Jawa tetapi secara fiqih, Tuhid dan Sufinya. Pengikut ajaran dari Kyai Ahmad Rifa'i kemudian disebut Aliran Rifa'iyah. Perbedaan cara penyampaian dapat dilihat dari contoh seperti Kyai Rifa'i menyampaikan bahwa rukun Islam ada satu, sedangkan kalau NU ada lima. Satu rukun Islam ini adalah mengucapkan dua kalimat shahadat yang berbunyi '*Ashadualailahailallah Waashadu anna Muhammadarrosulullah*'. Dengan mengucapkan dua kalimat shahadat tersebut dan disaksikan oleh dua orang ahli yang bersikap adil maka seseorang sudah tunduk pada hukum Islam. Lalu orang yang telah tunduk pada hukum Islam atau menjadi Muslim, wajib melaksanakan 4 kewajiban yaitu menjalankan Sholat, Zakat, Puasa di bulan Ramadhan, dan berangkat Haji bila mampu. Jadi menurut pengikut Kyai Rifa'i, rukunnya ada satu tetapi kewajiban yang mengikuti ada empat.

²³ Kitab Tarojumah merupakan hasil tulisan dari Kyai Rifa'i. Kitab ini berbahasa Jawa kromo, tetapi kitab yang beredar di luar Jawa (Menado khususnya) menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu terjadi ketika Kyai Rifa'i diasingkan di Menado. Kitabnya sama Cuma berbeda bahasa. Kitab Tarojumah ini berisi nadhom (syair-syair) disusun dengan referensi dari Al'quran, Hadis, dan kitab-kitab fiqih dari para ulama salaf. Kitab ini menjelaskan 3 perkara yaitu usuludin (keimanan), fiqih (ibadah) dan tasawuf (metode). Dalam fiqih terdiri dari dua, yaitu fiqih muamalah (dengan sesama manusia) dan fiqih ibadah (dengan Tuhan). Kitab ini tidak dijual bebas, karena untuk mempelajari kitab ini perlu pendampingan dari seorang guru. Aliran Rifa'iyah meyakini bahwa jika mempelajari kitab ini tanpa pendampingan seorang guru, walau berbahasa Jawa apa yang di pelajari tidak muthasil (tidak utuh/menyatu antara teks dan makna). Menurut Mas Agus, dalam kitab yang berbahasa Jawa ini banyak kata-kata yang mengandung makna-makna yang khusus.

²⁴ Wawancara dengan Agus pada bulan Juni 2015.

Tjokroaminoto, SDI berkembang di Pekalongan sebagai sebuah gerakan pembaharuan Islam yang memilih bidang politik sebagai basis kegiatannya. Pada tahun 1927 SI menyelenggarakan Kongres Al-Islam ke-8 di Pekalongan. Dalam kongres tersebut Muhammadiyah dan NU secara bersama-sama menolak terjemahan Al-Quran yang dilakukan HOS Tjokoaminto.

Sementara Al-Irsyad berkembang di Pekalongan sejak tahun 1917. Berkembangnya Al-Irsyad di Pekalongan dilakukan kebanyakan oleh orang Arab dari golongan non Shyaid²⁵. Berkembang setelah pada kisaran tahun 1913 di Jakarta sekelompok orang Arab keluar dari Jamiat Kheir dan mendirikan Al-Irsyad. Al-Irsyad yang pada tahun awalnya berkembang hanya di Jakarta dengan dibukanya sekolah guru serta sekolah-sekolah dasar, menengah dan atas. Kemudian mulai berkembang ke daerah yang banyak terdapat orang-orang Arab seperti Cirebon, Bumiayu, Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan Lawang. Perkembangan Al-Irsyad di Pekalongan tidak lepas dari upaya tokoh pendiri Al-Irsyad yaitu Syaikh Ahmad Soorkatti yang pernah menetap beberapa tahun di Pekalongan sebelum kembali ke Jakarta hingga akhir hayatnya. Sejarawan Deliar Noer menyatakan bahwa Syaikh Ahmad Surkati memainkan peran penting sebagai mufti di Indonesia. Begitu pula sejarawan Belanda G.F. Pijper menyebut Ahmad Sukarti sebagai seorang pembaharu Islam di Indonesia. Pijper juga menyebut Al-Irsyad sebagai gerakan pembaharuan yang punya kesamaan dengan gerakan reformasi di Mesir. Pada masa ini Lembaga pendidikan Al-Irsyad memberi warna pada cara pendidikan moderen dan memberikan warna fundamentalis menurut beberapa ahli sejarah lainnya.

Muhamadiyah yang merupakan kelompok puritan dan modern mulai berkembang di Pekalongan sejak tahun 1923.²⁶ Gerakan yang disemangati oleh pembaharuan dan pemurnian Islam ini di Pekalongan banyak bergerak di bidang pendidikan/persekolahan, panti asuhan dan

²⁵ Wawancara dengan Habib Rido pada bulan Mei 2015.

²⁶ Secara resmi pengurus pertama Muhammadiyah Cabang Pekalongan diketuai oleh Sutan Mansyur dan disahkan tanggal 1 Juli 1928.

rumah sakit. Di Pekalongan gerakan Muhamadiyah berkembang terutama di daerah Pekajangan yang merupakan salah satu pusat Industri tekstil di pekalongan.

Sementara itu aliran Syi'ah mulai berkembang di Pekalongan pada sekitar tahun 1989 setelah Ustadz Ahmad Baraghbah mendirikan pesantren Al Hadi di kampung Arab. Di Pekalongan, perkembangan komunitas Syi'ah di Pekalongan kurang menggembirakan bahkan mendapat penolakan dan tekanan. Pada tahun 1999 pada saat pesantren Al Hadi mengembangkan sayapnya dengan mendirikan pondok pesantren di desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Pesantren baru ini dibubarkan secara paksa oleh gerakan massa karena dituduh menyebarkan ajaran yang tidak lazim dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Di era reformasi, organisasi-organisasi Islam baru juga mulai berkembang di Pekalongan. Seperti Organisasi FPI (Fron Pembela Islam) yang mulai berdiri pada tahun 2000. Organisasi ini mendapat dukungan oleh 17 elemen organisasi masyarakat dan partai politik²⁷. Salah satu tokoh yang mengemuka di Pekalongan adalah Said Sungkar. Said Sungkar merupakan salah satu tokoh penting yang menjabat sebagai ketua Dewan Syuro FPI Pekalongan. Dia juga merupakan salah satu orang penting dalam gerakan Islam di Indonesia. Dia diduga memiliki kedekatan dengan jaringan Jamaah Islamiyah Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan kasus kerusuhan Temanggung, meski tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas perannya itu.

Wong Kaji dan Pronggok: pertumbuhan kelas menengah Islam di Pekalongan

Selain kota santri, Pekalongan dikenal dengan kota batik. Kalau kita berkunjung ke Pekalongan suasana yang menunjukkan hal tersebut mulai tampak ketika memasuki kota Pekalongan. Jika dari

²⁷ Studi Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, 2012, halaman 59-63

arah Semarang kita akan menemukan baliho-baliho berukuran besar mengiklankan produk batik. Selain itu kita mendapati pasar atau toko-toko grosir batik. Bila dari arah Jakarta di kanan jalan setelah pasar



Industri batik tradisional rumahan

Wiradesa kita dapat jumpai pasar batik yaitu IBS (Internasional Batik Center). Jalan-jalan didalam kota pun sering dipadati banyak pengendara motor atau becak yang lalu lalang membawa mori atau kain batik yang telah jadi untuk dibawa ke pasar. Jika lebih masuk kedalam kampung-

kampung akan kita temukan pemandangan yang khas kampung batik: rumah-rumah pengrajin batik, yang sedang melakukan kegiatan membatik tulis dan cap, maupun yang menjahit bahan batik menjadi pakaian siap pakai. Di lingkungan rumah-rumah akan nampak orang yang lalu lalang melakukan aktivitas perbatikan seperti menstempel kain, menyelup kain untuk memberi warna, mencuci, dan menjemur. Didekat rumah-rumah ini akan tampak tiang-tiang bambu tempat menjemur kain yang telah selesai diberi warna dan di cuci.

Kegiatan perdagangan dan industri batik tradisional telah berlangsung cukup lama di Pekalongan.²⁸ Industri batik tradisional tersebut merupakan industri rumah tangga yang tersebar di kampung-kampung. Bahan bakunya terutama kain mori dan gundo rukem di diimport. Itu sebabnya sebagaimana telah disinggung terdahulu pada tahun 1850 an pemerintah Hindia Belanda membangun pelabuhan Pekalongan sebagai pelabuhan import tebatas. Apabila para pengrajin batik tradisional kebanyakan adalah penduduk pribumi Jawa, maka para pemasok bahan baku dan juga pemasaran berada di tangan para pedagang Cina dan Arab.

²⁸ Beberapa penulis memperkirakan industry batik sudah ada sejak awal abad XVI; M. Dirhamsyah, 2014

Batik tradisional, merupakan batik yang dihasilkan melalui proses manual tanpa mesin. Batik jenis tulis dihasilkan melalui kerajinan tangan dengan menggambar ornament-ornament yang dikehendaki dengan lilin memakai canting pada selembar kain mori. Baru sesudahnya proses memberi warna dilakukan. Itu sebabnya satu lembar kain membutuhkan waktu pengerjaan 4-6 bulan.

Perkembangan batik tradisional ini semakin meningkat di sekitar tahun 1940, dengan dipakainya teknik cap. Teknik membatik ini menggunakan alat sederhana untuk menempelkan ornamen-ornamen pada kain. Pengerjaan dengan teknik ini lebih cepat dari pada cara membatik dengan canting karena ornamen sudah siap. Sehingga dengan teknik cap kain batik yang dapat dihasilkan sekitar 100 potong perminggu²⁹.

Usaha industri rumah tangga batik tradisional ini dikelola dengan manajemen “satu dompet” yang artinya tidak ada pemisahan keuangan antara usaha dan pengeluaran rumah tangga (Amalinda Savirani, 2008). Dalam situasi itu industri tradisional yang berbasis rumah tangga ini cenderung untuk tetap menjadi industri kecil-kecil. Studi Lance Castle tentang pengusaha muslim pribumi di lingkungan industri rokok di Kudus menemukan adanya kecenderungan dari pengusaha muslim untuk memecah perusahaannya untuk dibagikan kepada anak-anaknya dengan akibat mengecilnya secara terus menerus daya perusahaan pribumi muslim.³⁰

Dalam penelitian di Pekalongan diperoleh informasi bahwa strategi untuk memecah perusahaan itu sebenarnya juga dilakukan dengan maksud justru menjaga agar perusahaannya tetap kecil (namun banyak) untuk menghindari ketentuan hukum yang rumit, antara lain menyangkut perpajakan, perijinan, perburuhan dsb bila statusnya menjadi perusahaan besar. Sebelum mereka mampu memenuhi

²⁹ Baca artikel berjudul “Kota Batik di Pekalongan, Bukan Jogja eh bukan Solo” yang dimuat di web LKiS oleh Linda (Staf peneliti LKiS).

³⁰ Lihat buku Castles, Lance, “Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus”, Sinar Harapan, 1982.

persyaratan-persyaratan yang ada mereka merasa lebih nyaman menjadi perusahaan kecil.³¹ Menurut Arbi Sanit perusahaan-perusahaan batik tradisional di Pekalongan itu memiliki sifat kemandirian yang tinggi.³²

Usaha batik tradisional yang berbasis rumah tangga dalam istilah lokal dinamai Pranggok. Pranggok merupakan istilah bagi rumah usaha batik tradisional baik itu batik tulis maupun batik cap. Para pengusaha pranggok bisa memiliki 1-5 pranggok. Tiap pranggok memiliki seorang atau lebih mandor yang bertugas mengawasi dan mengatur para pegawai yang berjumlah sekitar 50-100 orang, selain juga mengatur jalannya produksi.

Semakin banyaknya pengusaha pranggok yang berhasil mengembangkan usahanya sehingga memiliki modal dan relative kaya sehingga berpeluang untuk naik haji nampaknya merupakan salah satu indikasi berkembangnya kelas menengah dikalangan pengrajin batik tradisional. Mereka itu dilingkungan masyarakat Pekalongan dikenal dengan sebutan 'wong kaji' walaupun tidak semua mereka telah naik haji ke Mekah.

Perkembangan usaha perbatikan tradisional itu kemudian meningkat lagi di era tahun 1950 dengan dikeluarkannya "program benteng"³³ oleh Soekarno untuk mengembangkan usaha perekonomian pribumi. Sayangnya kebijakan ekonomi ini hanya berlangsung hingga tahun 1957. Untuk menunjang infrastruktur Batik yang menjadi ikon penting pekalongan, sejak tahun 1960 koperasi batik dibawah Persatuan Pembatikan Indonesia Pekalongan (PPIP) diberi hak monopoli impor kapas dan kain putih selain memproduksi benang serta

³¹ Hasil wawancara dengan Kartolo pada bulan November 2015.

³² Lihat Arbi Sanit dalam bukunya Samsuddin Haris, tahun 1999, hal 28

³³ Program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Tujuannya adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia "pribumi" (dalam arti "non-Tionghoa").

kain mori bersama pendistribusiannya untuk kota tersebut dan wilayah pedalaman.³⁴

Namun walaupun demikian para pengusaha batik tradisional juga di perhadapkan pada proses konglomerasi, dengan jaringan ekonomi kuat dari para pemilik pabrik. Ketimpangan dalam persaingan juga dirasakan ketika order-order dalam skala besar seperti batik seragam PNS (korpri) pada tahun 1995 dari pemerintah diberikan kepada perusahaan batik printing, sehingga semakin berkurang daya tahan dari pengusaha tradisional.³⁵

Perlu dicatat bahwa industri Kota Pekalongan pada kisaran tahun 1995 dikuasai oleh usaha kecil. Ini dapat dilihat dari data tahun 1995 bahwa terdapat 22 buah industri batik moderen yang menampung sekitar 5.849 orang tenaga kerja, yang jika dibandingkan dengan industri kecil yang berjumlah 3.884 buah yang memberi lapangan kerja bagi 29.802 orang. (Arbi Sanit, 1998)

Sebagian pengusaha batik tradisional dapat bertahan, dengan cara menjadi sub perusahaan dari para konglomerat atau mencari pasar yang berbeda seperti pasar diluar negeri. Akan tetapi banyak yang harus gulung tikar karena tidak mampu untuk bersaing dipasar batik lokal. Tercatat 50 industri batik tradisional pada tahun 1995 gulung tikar, yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. PT Panisatex yang memiliki 245 orang karyawan terpaksa merumahkan karyawannya selama 1 tahun. PHK juga dilakukan oleh tiga perusahaan yang memiliki 518 orang pekerja.

Kondisi persaingan ini juga mempengaruhi relasi antar etnis yang kemudian menjadi salah satu akar berbagai konflik kepentingan dan perebutan penguasaan sumber ekonomi. Persaingan ini juga meluas menjadi persoalan etnis, dengan adanya kebijakan pemerintah diatas yang dianggap oleh para pengerajin tradisional lebih memihak etnis China yang memiliki modal besar. Sebenarnya kelembagaan industri

³⁴ Lihat Arbi Sanit, 1999, hal 18.

³⁵ Arbi Sanit, 1999, hal 26.

batik cukup kuat dalam hal relasi antar etnis. Etnis Tionghoa (China) menjadi pemilik toko bahan baku kain/pewarna, etnis arab mengambil pembagian produksi dan marketing, dan etnis jawa sebagai penggarap (buruh) dan produsen. Relasi antar etnis menjadi terganggu, karena kolomerasi yang begitu kuat dari industri modern.

Kejatuhan pengusaha-pengusaha batik tradisional ini kemudian ikut memicu timbulnya ketegangan-ketegangan sosial hingga kemudian terjadi beberapa kali kerusuhan di Pekalongan antara tahun 1997-1998 yang walau tidak terkait persoalan antar perusahaan tradisional dan modern, namun kalau dilihat korban dari etnis cina dan fasilitas negara disetiap kerusuhan dapat diduga bahwa salah satu faktor yang mendukung terjadi kerusuhan adalah karena kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan menurunnya industri batik tradisional.

Namun walaupun demikian, tren batik tidak selalu menurun. Tern batik mulai naik kembali setelah di nobatkannya batik sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2010 oleh UNESCO³⁶, kemudian juga ada usaha dari pemerintah daerah pekalongan untuk menaikkan tren batik ini melalui berbagai kegiatan vestival, karnaval, pembukaan musium, dll. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menenngah (UMKM) Kota Pekalongan, menunjukkan, hingga tahun 2012, jumlah industri batik didaerah ini sebanyak 634 unit usaha, dengan 9.992 tenaga kerja. Di luar industri batik, juga terdapat ratusan industri lain yang mendukung industri batik, antara lain industri tenun, aksesoris tekstil, dan bordir.

Dinamika sosial politik di era reformasi di Pekalongan

Di kota Pekalongan dinamika politik pada awal era reformasi ditandai oleh gejala berikut: (1) ketegangan dan konflik yang diakibatkan oleh liberalisasi politik; (2) dampak dari pembangunan

³⁶ Baca artikel Kompas, "Dari Batik Pekalongan Mendunia", Rabu, 17 Juli 2013.

daerah yang tidak merata; dan (3) konflik kepentingan sebagai dampak modernisasi.

Dampak dari liberalisasi politik

Untuk waktu yang cukup lama sejak masa Orde Baru, pemilu di Pekalongan selalu dimenangkan oleh PPP sebagai representasi partai-partai Islam. Hanya sekali saja di era Orde Baru tersebut Golkar memenangkannya yaitu pada perolehan kursi DPRD II pada tahun 1987. Kekalahan PPP tersebut merupakan dampak dari seruan NU di tahun 1984 untuk kembali ke Khittah yang artinya kembali kepada hakekat NU sebagai lembaga atau organisasi keagamaan (Ormas) seperti saat kalahkannya di tahun 1926, bukan atau tidak lagi sebagai organisasi politik. Perlu dicatat bahwa Pada tahun 1952 NU telah memutuskan untuk masuk ke ranah politik praktis, bahkan pada Pemilu 1955 menjadi partai politik peserta pemilu dan menang.³⁷

Salah satu arti kembali ke khattah adalah bahwa warga NU bebas untuk memilih partai politik yang dikehendaki. Akibatnya seruan kembali ke Khittah merupakan ancaman bagi kekuatan PPP. Banyak kyai yang loyal ke PPP menentang keras seruan kembali ke Khatthah. Di lain pihak kebebasan ini mengakibatkan banyak kyai atau habaib yang memiliki pengaruh dirangkul oleh Golkar. Baru pada pemilu 1992, PPP kembali memenangkan pemilu.

Pada masa Orde Baru ketegangan antara PPP dan Golkar dari pemilu ke pemilu cenderung semakin meningkat.³⁸ Di daerah-daerah basis PPP tersebut masyarakat memiliki kecenderungan mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah. Konon tidak ada orang yang berani memakai kaos selain PPP di wilayah ini. Makanan Bakso, kalau mienya dibiarkan kuning tidak akan laris, sehingga mienya akan diberi warna hijau. Toko-toko di sepanjang jalan Urip Sumoharjo hingga ke

³⁷ Baca Pradjarta, 1994, hal 160.

³⁸ Ketegangan tersebut sangat di rasakan terutama di daerah basis PPP seperti Jenggot, Buaran, Banyuurip Alit, Banyuurip Ageng, Ponolawen, Pringlangu, Simbangkulon dan Kelurahan Kradenan di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan, dan memasuki Desa Kertijayan hingga ke Kedungwuni atau wilayah Kabupaten Pekalongan.

Kedungwuni semuanya di cat hijau, termasuk toko milik warga etnis Tionghoa. Demikian juga dengan Pegawai Negeri Sipil yang tinggal di daerah-daerah ini, mereka harus menyembunyikan identitas kepegawainegriannya agar aman. Salah seorang sumber informasi menceritakan bahwa ia sebagai seorang PNS yang tinggal di Buaran bila hendak pergi ke kantor dia harus memakai pakaian biasa terlebih dahulu dan menggantinya dengan seragam Korpri di Pom Bensin.³⁹

Menjelang Pemilu 1997, Kota Pekalongan diwarnai bentrok massa antara massa pendukung PPP dan para pendukung Golkar. Peristiwa bentrok massa ini terkait penolakan massa pendukung PPP terhadap upaya-upaya Golkar dalam rangka mendongkrak suara perolehan pada Pemilu 1997. Salah satu cara Golkar mendongkrak suara yaitu dengan mengadakan tabliq akbar yang menghadirkan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Ketua DPP Golkar), KH Zaenuddin MZ, Rhoma Irama dan Ustad Choril Amar. Panggung tabliq akbar yang dipersiapkan untuk mereka dimuka Pesantren Alquran menjadi sasaran amuk massa hingga hangus dibakar. Hal ini dipicu oleh penurunan bendera OPP PPP disekitar pondok pesantren Alquran pada tanggal 24 Maret 1997, sehari sebelum tabliq akbar di selenggarakan. Kerusuhan ini berlangsung tiga hari dan meluas hingga ke pusat pertokoan hingga terjadi penjarahan, perusakan dan mengeluarkan barang-barang dari toko untuk di bakar di jalan.⁴⁰

Pada Pemilu 1999 yang merupakan pemilu multi partai pertama di era reformasi, pemilu di Kota Pekalongan diwarnai bentrok antara massa pendukung PPP dan massa pendukung PKB. Peristiwa bentrok massa itu terjadi di wilayah kelurahan Jenggot, Buaran, Simbang, Banyu Urip, dan Pringlangu. Peristiwa saling lempar batu, merusak rumah-rumah penduduk, penjarahan massa terhadap toko-toko Cina sempat terjadi kala itu. Karena terbelahnya pemilih Islam dalam mendukung PPP dan PKB, maka PDIP justru bisa meraih kemenangan

³⁹ Wawancara dengan Marzuki, tanggal 2 Juli 2015.

⁴⁰ Analisa terhadap kasus kerusuhan politik ini lihat artikel Arbi Sanit dalam bukunya Samsuddin Haris, tahun 1999, hal 12-17.

di Kota Pekalongan. Kemenangan PDIP ini bisa dilihat sebagai mudahnya loyalitas aliran dilingkungan partai islam yang dulunya didominasi oleh PPP, diikuti dengan menguatnya pragmatism dalam pemilu. Pada Pemilu 2004 Kota Pekalongan dimenangkan Partai Golkar.

Selain berlakunya sistem multi partai yang menyebabkan terbelahnya warga partai-partai yang telah mapan seperti dalam kasus PPP dan PKB, dinamika politik di Pekalongan menjadi semakin kompleks dengan diberlakukannya pilkada langsung dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pilkada langsung para calon akan terdorong untuk memiliki kedekatan langsung dengan para pemilih dengan atau tanpa melalui jalur partai. Dalam hal ini kualitas calon, tim sukses dan aktor-aktor politik didalamnya acap kali mengalahkan peran partai-partai pengusung.

Liberalisasi politik di Pekalongan nampak membawa perubahan-perubahan aliansi politik baru yang tidak terkungkung pada kerangka partai-partai yang telah mapan. Ini nampak dari adanya aktor-aktor politik yang dengan mudah bisa berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Para calon tidak selalu mencari dukungan dalam pilkada dari partai "asal"nya namun juga maju pilkada dengan menggunakan partai politik lain sebagai kendaraannya.

Dampak Pembangunan Ekonomi

Potensi strategis yang dimiliki oleh Pekalongan untuk tumbuh menjadi pusat perkembangan ekonomi regional mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota. Pembangunan infrastruktur ekonomi mendapat perhatian. Disektor industri batik seperti yang telah diuraikan diatas, pemerintah melakukan intervensi pasar dengan merenovasi pasar-pasar grosir batik, guna menarik investor asing dan pemercepatan industry batik, dan tidak hanya itu saja pemerintah pada tahun 1970an melakukan intervensi di bidang modal dan teknologi. Intervensi pemerintah ini mendorong perkembangan pesat batik printing di era orde baru. Hanya saja batik printing yang membutuhkan modal besar, tehnologi maju, dan pasar Global hanya

mampu di tangkap oleh pengusaha bermodal besar yang kebanyakan adalah beretnis cina. Sedangkan pengusaha jawa yang sejak semula berkecimpung sebagai produsen dan buruh batik yang menguasai tehnik dan seni perbatikan, tidak mampu untuk menangkap peluang usaha batik printing. Sehingga pada era ini terjadi proses pengambilalihan posisi produsen yang sebelumnya diperankan oleh suku jawa melalui batik tradisional diambil alih oleh industry batik printing yang kebanyakan dikuasai oleh etnis Cina. Etnis Cina yang sebelumnya hanya bergerak pada aspek penyediaan bahan baku (obat-obatan batik), dan pemasaran saja. Situasi ini ikut membangkitkan sentiment anti Cina di Pekalongan. Namun demikian dalam perkembangan waktu ternyata batik tradisional mampu mempertahankan pasar dan peminatnya, sehingga mereka memasuki segmen pasar yang berbeda. Batik sutra yang tidak bisa di produksi masal dengan model printing menjadi salah satu keuntungan yang dapat dikembangkan dikalangan batik tradisional. Dengan perkataan lain mereka mampu bertahan hidup dan mengembangkan management baru ala pranggok.

Dalam bidang perikanan, pelabuhan Pekalongan, sejak tahun 1974 dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) yang menjadi pelabuhan sandar bagi kapal-kapal nelayan dari berbagai penjuru nusantara. Sejak saat itu berbagai fasilitas dibangun untuk mendukung fungsi dan status yang baru sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara. Industri pembuatan kapal, bengkel, pabrik penyedia peralatan dan kebutuhan-kebutuhan sarana pendukung, KUD Mina yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan pelayaran (es batu, garam, bahan makanan, dll), tumbuhnya sector informal seperti toko kelontong, rumah makan. Disekitar Pelabuhan juga tumbuh kampung Bagan; disebut demikian karena kebanyakan penghuninya berasal dari Bagan Siapi-api.

Kapal-kapal besar yang bergerak di usaha penangkapan ikan umumnya telah memiliki peralatan penangkapan ikan dan penyimpanan yang canggih, sehingga dicurigai telah menghabiskan

ikan-ikan di wilayah tangkapan nelayan tradisional dan bertanggung jawab pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil.

Dengan perkataan lain nasib nelayan tradisional terpinggirkan. Apalagi akses bagi nelayan tradisional untuk menjual hasil tangkapan mereka ke PPNP tidak dimungkinkan karena kualitas produk yang kurang memenuhi standart.⁴¹ Untuk menampung kepentingan nelayan tradisional Pemda Pekalongan telah membangun dua TPI di bagian Selatan dan di bagian Utara. Namun ke dua TPI tersebut hanya memiliki fasilitas yang jauh lebih sederhana dibanding dengan fasilitas-fasilitas yang ada di PPNP. Kedua TPI ini dikelola oleh KUD Mina. Walaupun demikian usaha ini tidak sepenuhnya bisa mencegah kecemburuan social yang diakibatkan semakin lebarnya jurang ekonomi antara nelayan tradisioan dengan nelayan modern. Apalagi dengan kehadiran nelayan-nelayan bermodal besar yang kebanyakan beretnis cina.

Sejalan dengan perkembangan waktu maka berkembang berbagai usaha industry dan bengkel perkapalan di sekitar pelabuhan. Daerah ini kemudian dikenal dengan kampung Bagan karena di huni oleh orang-orang Bagan.



Ketegangan sosial juga muncul dengan terpinggirkannya masyarakat “Alang-alang” yaitu anak-anak atau orang dewasa yang memperoleh penghasilan dari jasa menurunkan ikan dan mencuci kapal-kapal.

⁴¹ Pada nelayan modern proses penyimpanan, penyotiran dari hasil tangkapan telah menerapkan cara-cara yang menghasilkan kualitas ikan yang lebih tinggi mutunya. Sedangkan hal itu tidak dimungkinkan dalam kapal-kapal tradisional.

Apabila sebuah kapal nelayan penangkap ikan merapat di dermaga maka biasanya sekelompok anak alang-alang⁴² mulai mendekati kapal dengan berenang disampingnya. Ketika balok kayu yang merupakan alat untuk meluncurkan “basket” (keranjang) yang berisikan ikan hasil tangkapan mulai dipasang, beberapa ‘anak alang-alang’ telah siap berada dibawahnya. Mereka siap dengan kantong plastik untuk mewedahi ikan yang jatuh tercecceer ketika keranjang-keranjang itu diluncurkan (slorokke). Sebagian dari alang-alang itu orang dewasa atau bahkan orang yang sudah berusia lanjut. Mereka mengumpulkan ceceran ikan yang jatuh kelaut atau ketanah dan setelah terkumpul menjualnya ke pasar atau kepedagang ikan. Harga ikan tangkapan nelayan setiap keranjang kecil (rombong) di TPI berkisar Rp.60.000 sementara harga ikan dari anak alang-alang biasanya hanya dihargai Rp.25.000, untuk jumlah yang sama. Selain sebagai pengumpul ikan anak alang-alang merupakan buruh murah bagi para pemilik kapal karena mereka dapat dimitai tolong menghela serta mencuci kapal. Nasib anak alang-alang menjadi suram dengan berkurangnya tangkapan nelayan tradisional.

Konflik Kepentingan Akibat dari Dampak Modernisasi

Dinamika politik di Pekalongan yang bermuara pada konflik dan ketegangan di awal reformasi sebenarnya merupakan bagian proses panjang yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun sebagian konflik kepentingan itu tidak terjembatani. Sebagai contoh misalnya tingkat polusi yang sangat tinggi di Kali Banger, yang sebelumnya merupakan sungai dimana penduduk mendapatkan air yang relative bersih menjadi tercemar berat karena menjadi tempat pembuangan limbah industry. Konflik juga terjadi di pasar-pasar

⁴² Tentang istilah Alang-alang ada beberapa pendapat terkait munculnya pengistilahan ini. Ada yang beranggapan bahwa sebutan alang-alang diberikan karena dulu ketika daerah pantai masih di tumbuhi banyak alang-alang, ketika hari gelap dan ada kapal yang sedang berlabuh untuk menurunkan ikan, anak-anak akan keluar dari alang-alang untuk mengambil ikan yang terjatuh dari keranjang ketika diturunkan dari kapal. Sedangkan ada juga yang beranggapan bahwa istilah alang-alang berasal dari bahasa Pekalongan yang berarti menghalangi (alang-alang) turunnya keranjang ikan yang di seluncurkan ke dermaga.

tradisional yang mengalami renovasi atau pembangunan pasar baru. Antara pedagang tradisional dan pedagang-pedangan retail/eceran bermodal kuat. Ketegangan juga muncul di kampung dimana banyak real estat baru yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan perumahan dari kalangan masyarakat yang relative kaya, sehingga menggeser lahan mata pencaharian petani. Kemudian juga ketegangan antar pemilik sarana transportasi tradisional (becak, andong, dll) dengan pengusaha sarana transportasi modern dalam kota. Lalu ketegangan sopir angkutan yang berebut jalur. Dan masih banyak lagi kesenjangan-kesenjangan sosial yang sering menjadi isu-isu penting yang diangkat dalam kampanye pemilu di Pekalongan.